

**PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MELALUI STRATEGI PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA: STUDI PADA PEMILU 2024 DI DESA TONSAWANG SATU,  
KECAMATAN TOMBATU, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**Edwin Septian Kambey<sup>1</sup>, Eunike Sinthike Pelleng<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Indonesia

Email Korespondensi: edwinkambey01@gmail.com

Email: widgeunike@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to examine the strategies implemented by the Voting Committee (PPS) to boost citizen political participation during the 2024 General Election in Tonsawang Satu Village, Tombatu District, Southeast Minahasa Regency. The study is motivated by a rise in voter turnout that has not been accompanied by a substantive growth in political awareness among residents. This situation is reflected in the prevalence of apathy, which hinders active community engagement in the democratic process. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Data collection involved in-depth interviews, direct field observation, and document analysis. Research informants included members of the District Election Committee (PPK) and the Voting Committee (PPS), as well as residents of Tonsawang Satu Village who played a role in organizing and conducting the 2024 election. The results indicate that the PPS successfully increased the number of voters from 352 to 381 through five key strategies: door-to-door data updating, social media outreach, village-level announcements, community group meetings, and persuasive approaches. However, this quantitative increase has not yet been matched by an improvement in the quality of substantive participation. Some residents remain apathetic due to low trust in political actors resulting from unfulfilled promises, limited political understanding, work commitments, and administrative hurdles regarding residency documents. The study concludes that the PPS strategies were effective in enhancing procedural participation—specifically in driving voter turnout at polling stations (TPS). Nevertheless, these strategies have not fully succeeded in fostering substantive political participation, as they remain influenced by structural, cultural, and psychological factors prevalent within the community.

**Keywords:** Strategy, Voting Committee (PPS), Public Political Participation.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi yang diterapkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Desa Tonsawang Satu, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Latar belakang penelitian ini adalah adanya peningkatan angka kehadiran pemilih yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesadaran politik secara substantif di kalangan warga. Kondisi tersebut tercermin dari masih maraknya sikap apatis yang menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian dilaksanakan dengan menerapkan metode kualitatif berpendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian mencakup anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS, serta warga Desa Tonsawang Satu yang turut berperan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPS berhasil meningkatkan jumlah pemilih secara kuantitatif dari 352 menjadi 381 orang melalui lima strategi utama, yaitu pemutakhiran data secara door-to-door, sosialisasi melalui media sosial, pengumuman di tingkat desa, pertemuan kelompok warga, serta pendekatan persuasif. Meskipun demikian, peningkatan kuantitatif tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas partisipasi secara substantif. Sebagian warga masih

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

460

Indexed



menunjukkan sikap apatis yang disebabkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap aktor politik akibat janji yang tidak direalisasikan, keterbatasan pemahaman politik, kesibukan dalam pekerjaan, serta kendala administratif terkait dokumen kependudukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi PPS terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi prosedural, khususnya dalam mendorong kehadiran warga di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil membangun partisipasi politik yang substantif karena masih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, kultural, dan psikologis yang berkembang di masyarakat.

**Kata kunci:** Strategi, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Partisipasi Politik Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Sebagai badan ad-hoc yang berada di garis terdepan penyelenggaraan pemilihan umum, Panitia Pemungutan Suara (PPS) memegang peranan yang amat strategis dalam menggerakkan partisipasi politik warga. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPS tidak semata-mata menjalankan fungsi teknis dan administratif, melainkan juga bertugas melaksanakan sosialisasi serta pendidikan pemilih—dua aspek yang sangat krusial bagi wilayah dengan tingkat literasi politik yang masih rendah. Melalui peran tersebut, PPS diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat, yakni keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik yang pada akhirnya memperkuat legitimasi sistem demokrasi.

Partisipasi politik dapat ditelaah dari dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi prosedural dan dimensi substantif. Dalam kerangka demokrasi prosedural, partisipasi diukur secara kuantitatif melalui tingkat kehadiran fisik pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai pemenuhan syarat legalitas formal suatu pemilu. Namun, dimensi ini memiliki kelemahan inheren, yakni rentan melahirkan partisipasi yang bersifat ritualistik tanpa disertai pemahaman rasional yang memadai, serta mudah dimanipulasi melalui praktik politik uang. Sebaliknya, demokrasi substantif menempatkan partisipasi bermakna sebagai inti utamanya, di mana keterlibatan pemilih bersumber dari kesadaran kritis, kemampuan mengawasi kebijakan publik, dan tuntutan akuntabilitas dari para pemegang kekuasaan.

Tantangan terbesar yang dihadapi PPS dalam mewujudkan partisipasi substantif adalah fenomena apatisisme politik. Sikap apatis ini lahir dari ketidakpercayaan warga terhadap elite politik serta kekecewaan mendalam atas berbagai janji kampanye yang tidak pernah ditepati. Di kawasan pedesaan, apatisisme kerap bertransformasi menjadi bentuk resistensi terhadap sistem yang dipandang hanya melanggengkan formalitas tanpa membawa perubahan nyata. Fenomena ini terkonfirmasi secara empiris di berbagai daerah, antara lain melalui rendahnya tingkat partisipasi di wilayah Bangka Belitung, temuan Aulia dan Suharto (2021) tentang kepasifan masyarakat akibat minimnya perubahan nyata yang dirasakan, serta hasil studi Yusuf (2020) yang mengungkap tingginya ketidakpedulian pemilih muda di pedesaan Sulawesi Selatan.

Realitas yang demikian kompleks turut dialami oleh Desa Tonsawang Satu, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pelaksanaan Pemilu 2024. PPS setempat telah menjalankan sejumlah upaya prosedural, mencakup sosialisasi digital melalui akun Facebook Ketua PPS dan pengumuman fisik mengenai Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemberian fasilitasi dan arahan terkait perekaman e-KTP bagi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, sosialisasi jadwal serta tahapan Pemilu 2024 di gereja-gereja lokal (GMIM Elim dan GPDI Tonsawang Satu), serta publikasi pendaftaran anggota KPPS melalui media sosial.

Dari sisi prosedural, rangkaian strategi tersebut membuahkan hasil yang terukur. Data observasi menunjukkan terjadinya peningkatan partisipasi pemilih dari 85% pada Pemilu 2019 (352 pemilih dari 411 DPT) menjadi 88% pada Pemilu 2024 (381 pemilih dari 429 DPT), atau mengalami kenaikan sebesar 3%. Kendati demikian, secara substantif ditemukan kesenjangan yang signifikan. Sebagian warga memperlihatkan sikap apatis dengan menolak mengikuti kampanye, enggan melakukan perekaman e-KTP

menjelang hari pemungutan, bahkan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Penelusuran lapangan mengungkap bahwa sikap apatis ini dipicu oleh kekecewaan yang mendalam terhadap oknum legislator yang tidak menepati janjinya, khususnya terkait perbaikan jalan raya jalur Tombatu-Tonsawang yang merupakan akses vital bagi distribusi hasil pertanian warga.

Kondisi ini memperlihatkan sebuah kontradiksi yang mencolok. Di satu sisi, kenaikan angka kehadiran di TPS menegaskan keberhasilan PPS dalam menjalankan tugas-tugas prosedural. Di sisi lain, PPS Desa Tonsawang Satu dinilai belum mampu mendorong partisipasi politik yang berkualitas secara substantif. Kinerja PPS masih terpusat pada ranah administratif formal dengan kreativitas strategis yang terbatas dalam mengantisipasi dan merespons sikap penolakan politik warga yang bersumber dari krisis kepercayaan terhadap para aktor politik. Tulisan ini akan dapat memberikan pemahaman baru pendekatan penguatan partisipasi politik pada level instrument paling dekat dengan pemilih.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dioperasionalkan melalui desain studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti dapat berperan sebagai instrumen utama dalam menggali secara mendalam dan alamiah makna yang melatari strategi PPS dalam mendorong partisipasi warga. Fokus kajian diarahkan pada analisis komprehensif terhadap efektivitas kinerja PPS dalam pelaksanaan pemilu presiden di lokasi penelitian. Lokus penelitian ditetapkan secara purposif, yaitu Desa Tonsawang Satu, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Penetapan ini dilandaskan pada studi pendahuluan (*grand tour*) yang mengidentifikasi adanya anomali berupa belum terwujudnya partisipasi politik substantif pada Pemilu 2024 meskipun upaya prosedural telah dilaksanakan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi sistematis terhadap kondisi sosiologis dan dokumen kependudukan warga desa, serta dokumentasi berupa pengarsipan dokumen resmi Pemilu dan bukti visual kegiatan sosialisasi guna memperkuat validitas data.

Analisis data dilaksanakan secara sirkuler dan interaktif melalui tiga tahapan: reduksi data yang meliputi pemilahan, penyederhanaan, dan pembuangan informasi yang tidak relevan; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur dan sistematis; serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menafsirkan makna temuan lapangan, mengonfirmasikannya dengan teori demokrasi substantif, dan merumuskan kesimpulan akhir riset. Seluruh proses penelitian dijalankan dengan mematuhi prinsip etika penelitian sosial, mencakup persetujuan informan, kerahasiaan data, serta penghormatan terhadap konteks budaya masyarakat Desa Tonsawang.

## PEMBAHASAN

### Profil Demografis Desa Tonsawang Satu

Desa Tonsawang Satu, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki karakteristik demografis yang turut memengaruhi pola partisipasi politik warganya pada Pemilu 2024. Dari sisi jumlah penduduk dan hak pilih, sebanyak 429 warga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), meningkat 18 jiwa dibandingkan Pemilu 2019 yang mencatat 411 DPT. Dari total DPT tersebut, sebanyak 381 warga menggunakan hak suaranya di TPS. Mayoritas penduduk desa bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Karakteristik agraris ini menjadikan warga sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan desa, terutama jalur Tombatu-Tonsawang, sebagai sarana mobilitas dan distribusi hasil pertanian mereka. Dari sisi keagamaan dan sosial, masyarakat Desa Tonsawang Satu merupakan komunitas pedesaan yang religius dengan basis sosial yang terpusat pada institusi gereja lokal, khususnya GMIM Elim Tonsawang Satu dan GPDI Tonsawang Satu, yang berfungsi sebagai pusat interaksi sosial utama di desa.

### Optimalisasi Demokrasi Prosedural: Sosialisasi dan Mobilisasi Pemilih

Sebagai representasi badan ad-hoc penyelenggara Pemilu yang paling dekat dengan komunitas akar

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

462

Indexed



rumpun, PPS Desa Tonsawang Satu mengemban tanggung jawab menjembatani regulasi formal KPU dengan realitas sosiologis masyarakat lokal. Temuan riset mengindikasikan bahwa PPS secara proaktif mengambil peran sebagai katalisator gerakan pemilih, melampaui batas-batas tugas administratif dasarnya. Hal ini tercermin dari keterangan Ketua PPS Desa Tonsawang Satu (S.B):

*"PPS berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lewat mengajak masyarakat untuk aktif lewat sosialisasi, lewat media sosial maupun pengeras suara atau secara langsung kepada masyarakat."*

Dalam pelaksanaannya, PPS menerapkan sinergi instrumen sosialisasi yang beragam untuk memastikan distribusi informasi Pemilu berjalan secara inklusif. Anggota PPS (V.M) menguraikan teknis implementasi di lapangan:

*"Program sosialisasi, pamflet, lewat pengeras suara dan mengajak langsung masyarakat."*

Secara operasional, PPS memanfaatkan sistem pengeras suara desa untuk menjangkau seluruh wilayah permukiman, memasang pengumuman tertulis di papan informasi kantor desa, menggunakan akun Facebook pribadi Ketua PPS untuk menjangkau pemilih pemula, serta melaksanakan kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Selain itu, PPS memanfaatkan ruang komunal keagamaan melalui pengumuman resmi di Gereja GMIM Elim dan GPDI Tonsawang Satu. Merujuk pada teori sosialisasi politik Gabriel Almond dan G. Bingham Powell Jr., gerakan multidimensi ini dikategorikan sebagai bentuk sosialisasi politik formal, di mana PPS bertindak sebagai agen negara yang absah dalam membangun pengetahuan dasar politik masyarakat, mencakup jadwal pencoblosan, verifikasi DPS, perbaikan DPT, mekanisme pendaftaran KPPS, hingga ajakan perekaman e-KTP.

Keberhasilan pelaksanaan sosialisasi formal tersebut tercermin pada capaian kuantitatif hak pilih warga Desa Tonsawang Satu pada Pemilu 2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel: Keberhasilan Pelaksanaan Sosialisasi Formal**

| Indikator Capaian Kuantitatif Pemilu | Pemilu 2019 | Pemilu 2024 | Akumulasi Pertumbuhan |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Daftar Pemilih Tetap (DPT)           | 411 jiwa    | 429 jiwa    | Bertambah 18 pemilih  |
| Pengguna Hak Pilih di TPS            | 352 jiwa    | 381 jiwa    | Bertambah 29 pemilih  |
| Persentase Partisipasi Politik       | 85,6%       | 88,8%       | Meningkat 3,2%        |

Pertumbuhan persentase pemilih sebesar 3,2% tersebut memperoleh landasan teoretis yang kuat dari perspektif mobilisasi politik Rosenstone dan Hansen (2013). Partisipasi politik tidak tumbuh secara spontan dalam ruang hampa, melainkan senantiasa membutuhkan stimulus eksternal yang mampu mereduksi biaya partisipasi sekaligus memperbesar ekspektasi manfaat dari tindakan memilih. Di Desa Tonsawang Satu, PPS berhasil menjadi stimulus eksternal dimaksud dengan menerapkan strategi titik kontak jamak, termasuk mendatangi langsung kebun-kebun rakyat untuk mengingatkan warga mengenai jadwal pemungutan suara. Dalam perspektif Rosenstone dan Hansen, strategi ini berhasil menjangkau kelompok pemilih marginal, yaitu warga yang semula berada di ambang keraguan prosedural namun akhirnya tergerak untuk menggunakan hak pilihnya berkat pendekatan yang personal dan kontekstual.

## Hambatan Demokrasi Substantif: Apatisme Politik dan Faktor Multidimensi

Di balik keberhasilan kuantitatif-prosedural tersebut, penelitian ini mengungkap fakta kontradiktif yang menunjukkan rendahnya kualitas partisipasi politik secara substantif. Peningkatan angka kehadiran di TPS belum mencerminkan kesadaran kritis pemilih, melainkan masih terjebak dalam fenomena partisipasi semu (hollow participation)—hadir secara fisik namun nihil dari pertimbangan rasional-ideologis. Hambatan ini bersumber dari lima faktor determinan yang bekerja secara simultan.

Pertama, krisis kepercayaan terhadap elite politik. Penelitian ini menemukan adanya luka kepercayaan yang mendalam di kalangan warga terhadap para elite politik. Sejumlah pemilih menyatakan bahwa

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

463

Indexed



keikutsertaan dalam pemilu terasa sia-sia karena tidak menghasilkan perubahan nyata, khususnya dalam hal perbaikan infrastruktur jalan jalur Tombatu-Tonsawang yang merupakan akses vital distribusi hasil pertanian. Janji kampanye perbaikan jalan dari oknum legislator pada periode sebelumnya tidak pernah diwujudkan. Merujuk pada pandangan Huntington dan Nelson, sikap penolakan warga untuk terlibat dalam kampanye maupun keengganan sebagian DPT untuk datang ke TPS merupakan manifestasi dari apatisme politik rasional—bukan lahir dari ketidaktahuan, melainkan sebagai respons logis terhadap sistem yang dinilai hanya menjadikan mereka objek mobilisasi suara tanpa adanya timbal balik yang menyejahterakan.

Kedua, keterbatasan sosial-ekonomi dan literasi politik. Sebagai komunitas agraris, sebagian besar warga Tonsawang Satu bekerja sebagai petani atau buruh kebun dengan jam kerja yang panjang sejak pagi hingga sore hari. Salah satu informan warga (N.S) menegaskan bahwa kesibukan pekerjaan menjadi alasan utama yang mengorbankan keterlibatan dalam urusan politik. Di samping itu, rendahnya latar belakang pendidikan—yang didominasi lulusan SD dan SMP—berimplikasi pada minimnya literasi politik substantif, sehingga pemilu cenderung dimaknai sebatas kewajiban ritualistik formal, bukan sebagai sarana untuk mengevaluasi visi-misi kandidat atau menuntut akuntabilitas elite pasca-pemilu.

Ketiga, dukungan kelembagaan yang solid namun terhambat kendala administratif. Secara kelembagaan, PPS Desa Tonsawang Satu memperoleh dukungan operasional yang kuat dari KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dan PPK Tombatu, mencakup pelatihan teknis, distribusi logistik yang tepat waktu, serta bimbingan administratif yang berjalan tanpa hambatan berarti. Namun demikian, kendala struktural justru datang dari luar sistem kepemiluan, yakni dari birokrasi administrasi kependudukan. Meskipun PPS telah mendata dan mengimbuu warga dalam DPS untuk segera melakukan perekaman e-KTP di Kantor Dukcapil Kabupaten, mayoritas warga menundanya hingga mendekati masa tenang. Jarak geografis yang jauh, beban biaya transportasi, prosedur yang rumit, dan antrean panjang menjadi hambatan struktural yang secara faktual mendiskualifikasi hak pilih warga pada hari pemungutan suara.

Keempat, budaya paternalistik dan partisipasi berbasis konformitas. Karakteristik sosial perdesaan yang paternalistik dan komunal mendorong warga untuk menempatkan tokoh formal (Hukum Tua) dan tokoh agama (Pendeta/Gembala Sidang) sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan politik. Strategi PPS yang merangkul institusi gereja terbukti sangat adaptif dan efektif dalam mempermudah distribusi informasi. Hal ini diakui oleh informan warga (N.S dan Y.D) yang menyatakan bahwa pengumuman PPS di gereja meningkatkan kesadaran mereka untuk hadir ke TPS. Namun, pola komunikasi top-down ini melanggengkan budaya politik yang pasif; warga datang ke TPS lebih karena dorongan konformitas sosial—takut dianggap tidak patuh pada tokoh lokal atau sekadar mengikuti kebiasaan keluarga—ketimbang didasarkan pada kesadaran politik yang mandiri.

Kelima, kesenjangan digital (digital divide). Pemanfaatan platform Facebook oleh PPS sebagai medium sosialisasi merupakan adaptasi yang positif untuk menjangkau pemilih pemula. Namun, efektivitas medium ini terbentur oleh realitas kesenjangan digital di pedesaan. Anggota PPS (V.M) mengakui bahwa sebagian besar generasi tua di desa tidak memiliki gawai (smartphone) maupun paket data internet. Budaya komunikasi lokal di perdesaan pun masih mengandalkan model komunikasi lisan tatap muka dibandingkan infografis digital yang rentan dimanfaatkan untuk penyebaran informasi keliru. Akibatnya, instrumen konvensional seperti pengeras suara desa tetap menjadi andalan utama, meskipun jangkauannya terbatas bagi warga yang tengah beraktivitas di area perkebunan yang jauh dari permukiman.

Keterbatasan PPS dalam mengatasi hambatan-hambatan sosiologis tersebut diakui secara jujur oleh Anggota PPS (V.M):

*"Memang ada kenaikan jumlah pemilih, tapi kami akui tidak semua warga mau menggunakan hak pilihnya. Sebagian masih kecewa dengan janji politik yang tidak ditepati, terutama soal perbaikan jalan... Jadi meskipun angka partisipasi naik sekitar 3 persen, kami rasanya masih belum bisa mengubah sikap warga yang sudah betul-betul apatis."*

Pengakuan ini sejalan dengan distingsi yang dikemukakan Rosenstone dan Hansen antara mobilisasi jangka pendek dengan keterlibatan politik jangka panjang. Anggota PPS lainnya (H.M) pun mengonfirmasi



munculnya fenomena hollow participation di lapangan:

*"Dari sisi prosedural, kami merasa target KPU tercapai... Tapi kalau ditanya apakah semua pemilih yang datang itu paham betul visi-misi calon, saya rasa belum semuanya. Ada yang datang hanya karena diajak tetangga atau karena takut tidak mendapat bantuan sosial."*

Sebagai lembaga ad-hoc dengan masa kerja yang terbatas, PPS pada dasarnya tidak memiliki kewenangan struktural untuk merestrukturisasi kondisi ekonomi warga, memulihkan kepercayaan yang tergerus akibat janji kosong legislator, mengintervensi birokrasi administrasi kependudukan, maupun memutus mata rantai kesenjangan digital. Keberhasilan PPS Tonsawang Satu sepenuhnya berada pada tataran prosedural dan belum mampu menembus batas transformasi menuju partisipasi politik substantif yang mandiri dan kritis.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja PPS Desa Tonsawang Satu pada Pemilu 2024 berada dalam pusaran kontradiksi antara keberhasilan kuantitatif dan kesenjangan kualitatif. PPS terbukti berhasil mengoptimalkan sosialisasi formal dan memobilisasi pemilih marginal sehingga mampu mendongkrak persentase partisipasi prosedural hingga mencapai angka 88,8%. Namun, efektivitas gerakan ad-hoc ini terbentur oleh resistensi psikologis warga berupa apatisisme politik rasional yang bersumber dari krisis kepercayaan terhadap elite politik yang ingkar janji, keterbatasan sosial-ekonomi, belenggu struktural administrasi kependudukan, serta budaya paternalistik perdesaan yang menghasilkan partisipasi berbasis konformitas sosial. Menyikapi temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi pendekatan dari model aktor tunggal menuju pendekatan multi-aktor yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas partisipasi tidak semestinya dibebankan secara periodik hanya kepada badan ad-hoc menjelang hari pemungutan suara. Pemerintah Desa, KPU, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam membangun program pendidikan politik kritis yang berkesinambungan lintas siklus pemilu. Selain itu, diperlukan penguatan akuntabilitas elite politik melalui mekanisme pengawasan publik terhadap realisasi janji kampanye, pengadaan layanan administrasi kependudukan yang proaktif dan inklusif di tingkat desa, serta penciptaan ruang dialog publik komunal—seperti forum debat kandidat atau musyawarah warga—guna mengikis apatisisme dan mengubah pola partisipasi ritualistik menjadi kesadaran politik yang substantif dan kritis.

## REFERENSI

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative politics: A developmental approach*. Little, Brown and Company.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia, R., & Suharto, T. (2021). Apatisme Politik dalam Pilkada di Kalimantan Selatan. *Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan*, 3(2), 67–79.
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: A resource model of political participation. *American Political Science Review*, 89(2), 271–294.
- Budiardjo, M. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Rosenstone, S. J., & Hansen, J. M. (1993). *Mobilization, participation, and democracy in America*. Macmillan Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tarrow, S. (2018). *Kekuatan Gerakan Sosial*, terj. Indradi. Bandung: Nusamedia.
- Yusuf, M. (2020). Apatisme Pemilih Muda dalam Pilkada Sulawesi Selatan: Kajian Sosiologis. *Jurnal Sosial dan Politik*, 12(3), 113–127.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

465

Indexed

